



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 362/BSN-I/HK.08/07/98  
TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN DEWAN STANDARDISASI NASIONAL  
(DSN) MENJADI PEDOMAN BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL ( BSN )

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional (BSN), dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman-pedoman BSN tentang kegiatan standardisasi nasional.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;  
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;  
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;  
4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;  
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-1/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan penggunaan lebih lanjut pedoman-pedoman Dewan Standardisasi Nasional menjadi Pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1998 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 1998

KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL,

  
IR. HERUDI KARTOWISASTRO



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 362/BSN-I/HK.08/07/98  
TANGGAL : 15 Juli 1998

DAFTAR PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL

NO.	JUDUL PEDOMAN	NOMOR PEDOMAN	
		LAMA	BARU
1.	Persyaratan umum kemampuan laboratorium kalibrasi dan laboratorium pengujian.	DSN 01	BSN 01
2.	Pedoman untuk penyajian hasil uji	DSN 04	BSN 04
3.	Persyaratan umum untuk penerimaan laboratorium pengujian	DSN 05	BSN 05
4.	Persyaratan umum untuk penerimaan unit sertifikasi	DSN 06	BSN 06
5.	Persyaratan umum untuk penerimaan Lembaga Inspeksi	DSN 07	BSN 07
6.	Pedoman untuk penyajian hasil inspeksi	DSN 08	BSN 08
7.	Pedoman penyusunan panduan mutu untuk laboratorium pengujian	DSN 09	BSN 09
8.	Tata laksana revisi dan amandemen SNI	DSN 10.1	BSN 10.1
9.	Tata laksana revisi dan amandemen SNI keselamatan	DSN 10.2	BSN 10.2
10.	Pedoman masyarakat standardisasi	DSN 11	BSN 11
11.	Pedoman untuk pelatihan standardisasi menuju ke profesi standar	DSN 12	BSN 12
12.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi personil	DSN 14	BSN 14
13.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi produk	DSN 15	BSN 15
14.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi sistem mutu	DSN 16	BSN 16



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO.	JUDUL PEDOMAN	NOMOR PEDOMAN	
		LAMA	BARU
15.	Sistem akreditasi Lab. Kalibrasi dan Lab. Penguji - Masyarakat umum untuk pelaksanaan dan pengakuan	DSN 17	BSN 17
16.	Kriteria asesor laboratorium	DSN 18	BSN 18
17.	Pedoman untuk persyaratan standar guna keperluan sertifikasi produk	DSN 19	BSN 19
18.	Istilah umum dan definisi yang berhubungan dengan standardisasi dan kegiatan yang terkait	DSN 20	BSN 20
19.	Pedoman pelaksanaan penilaian laboratorium (Pedoman bagi laboratorium)	DSN 21	BSN 21
20.	Pelaksanaan penilaian dan pelaporan ketidaksesuaian (Pedoman untuk Asesor)	DSN 22	BSN 22
21.	Informasi singkat tentang KAN dan sistem akreditasi Laboratorium	DSN 23	BSN 23
22.	Pedoman pengembangan dan pelaksanaan uji profisiensi laboratorium	DSN 24	BSN 24
23.	Persyaratan dan prosedur untuk akreditasi kalibrasi dan pengujian lapangan	DSN 25	BSN 25
24.	Pedoman penggunaan logo KAN atau tanda acuan akreditasi KAN untuk laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN	DSN 26	BSN 26
25.	Pedoman delegasi Indonesia dalam sidang internasional di bidang standardisasi	DSN 27	BSN 27
26.	Prosedur umum penilaian laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi (Pedoman bagi asesor KAN)	DSN 28	BSN 28
27.	Syarat dan aturan dalam sistem akreditasi laboratorium	DSN 29	BSN 29
28.	Pedoman penanganan terhadap pengaduan laboratorium yang telah diakreditasi	DSN 30	BSN 30
29.	Kriteria umum lembaga pelatihan asesor laboratorium	DSN 32	BSN 32
30.	Sistem registrasi nasional untuk asesor sistem mutu	DSN 34	BSN 34
31.	Syarat dan aturan yang mengatur pola sertifikat sistem mutu	DSN 36	BSN 36



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NO.	JUDUL PEDOMAN	NOMOR PEDOMAN	
		LAMA	BARU
32.	Pedoman penggunaan logo KAN atau tanda acuan akreditasi KAN untuk Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah diakreditasi.	DSN 37	BSN 37
33.	Pedoman penilaian pihak ketiga tentang sertifikasi sistem mutu pemasok	DSN 38	BSN 38
34.	Pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia	DSN 39	BSN 39
35.	Pedoman pelaksanaan penilaian Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) (Pedoman bagi LSSM)	DSN 44	BSN 44
36.	Pelaksanaan penilaian Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan pelaporan ketidaksesuaian (Pedoman untuk asesor)	DSN 45	BSN 45
37.	Pedoman lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi terhadap penanganan pengaduan	DSN 46	BSN 46
38.	Pedoman perumusan Standar Nasional Indonesia	DSN 47	BSN 47
39.	Modul I : Modul pernyataan diri, Sistem mutu - Model jaminan mutu dalam produksi	DSN 50	BSN 50

KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL,



IR. HERUDI KARTOWISASTRO